



Rencana Aksi Tahun 2024

**DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami pajatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024 dapat tersusun.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran strategi, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2024.

Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Aksi (Renaksi) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode 2024- 2026 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Demikian semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024.

Kepala Dinas

M. Rachmat Rogianto, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas mulai dari penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berkualitas kepada mitra kerja (*stakeholder*), sampai kepada adanya pengawasan yang profesional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari KKN.

Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah :

- Pasal 12 :
 - Ayat (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah;
 - ayat (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.;

- Pasal 14 :
 - ayat (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota

Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pengelolaan Izin Lokasi;
 - f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
 - j. Penetapan Tanah Ulayat;
 - k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - m. Penatagunaan Tanah;
 - n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
 - o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
 - q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
 - r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 4) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, keputakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
 - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas;
 - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Bidang Permukiman

- a. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan

perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - c. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Bidang Pertanian

- a. Kepala Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi;
 - c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi;
 - d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);
 - e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
 - k. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - l. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
 - m. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
 - n. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah;
 - o. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
 - p. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
 - q. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah;
 - r. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin;
 - s. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Svasta, dan Masyarakat;
 - t. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong;

- u. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten;
 - v. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;
 - w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;
 - x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); dan
 - y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pengembangan Perumahan;
- b) Kawasan Permukiman;
- c) Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d) Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e) Pengelolaan Izin Lokasi;
- f) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- h) Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- i) Penetapan Tanah Ulayat;
- j) Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- k) Fasilitasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- l) Penatagunaan Tanah;
- m) Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
- n) Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- o) Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
- p) Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan

- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Perumahan
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
- e. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

c. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

d. Sistematika Penulisan

- Bab 1 Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - c. Landasan Hukum
 - d. Sistematika Penulisan
- Bab 2 Rencana Strategis
 - a. Tujuan dan Sasaram
 - b. Strategi dan Kebijakan
 - c. Indikator Kinerja
- Bab 3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
 - a. Perjanjian Kinerja
 - b. Rencana Aksi
- Bab 4 Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGIS

a. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Visi Misi dalam RPJMD Provinsi Banten 2023-2026, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu **“Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur”** dengan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah”** Tujuan utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang hendak dicapai periode 2023-2026 adalah **“Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah”**

Adapun keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026:

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan hasil pembahasan **review terhadap Cascading Indikator kinerja Utama**, terjadi perubahan indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70-80		
2	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	Luasan permukiman kumuh	109,42 Ha	109,42 Ha	100%
3		Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	60,83%	60,83%	100%

4		Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	91,73%	99,53%	108,51%
5		Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%

b. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan
- b. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;
- c. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah;

Kebijakan

Kebijakan Umum bidang perumahan dan permukiman sebagai rumusan dari strategi antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

c. Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022, hal-

hal yang menjadi ukuran keberhasilan/Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah :

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD;
2. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani;
3. Persentase Rumah layak Huni;
4. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah;
5. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi.

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut, untuk Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani sampai dengan tahun 2023 sebesar 375,27 hektar atau capaian 391,60, indikator Persentase Rumah layak Huni tahun anggaran 2022 sebesar 88.66% dengan capaian 76.14%, indikator Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah tahun anggaran 2022 sebesar 20.00% dengan capaian 0.00%, indikator Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi tahun anggaran 2022 sebesar 100.00% dengan capaian 42.86%.

Tabel 2.3 Realisasi Kegiatan tahun 2023

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
					Kinerja	Kinerja	Kinerja	
1	5			6	7	9	11	14
	Program Penunjangh Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	92,07	92,07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat belanja peralatan yang digunakan untuk untuk Pemeliharaan di kawasan banten lama dan pemeliharaan di KP3B Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	100,00	100,00	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	2	100,00	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	100,00	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	2	100,00	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100,00	
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah			Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	100,00	100,00	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58	58	100,00	
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00	
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100,00	
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100,00	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00	
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1	1	100,00	

		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	100,00	
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00	
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	100,00	100,00	
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100,00	
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100,00	
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100,00	
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00	
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00	
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	100,00	100,00	
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	3	100,00	
		2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100,00	
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	100,00	
		4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3	2	2	100,00	
		5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00	
	5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	100	100,00	100,00	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	100,00	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	16	100,00	
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	100,00	
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100,00	
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100,00	
		6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	164	164	100,00	
		7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	100,00	

		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00	
		9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00	
		10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100,00	
	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	46,15	46,15	
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	100,00	
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37	16	43,24	
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	100	100,00	100,00	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00	
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	
	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	82,48	82,48	
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17	17	100,00	
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	56	100,00	
		3	Sub Kegiatan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	376	297	78,99	
		4	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	1	100,00	
		5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	1	100,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	43,50	47,27	108,66	Target telah tercapai
	1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Ketercapaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	9	9	100,00	

		1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	3	3	100,00	
		2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2	2	100,00	
		3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	1	100,00	
		4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	1	100,00	
		5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	1	1	100,00	
		6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	1	100,00	
	2	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Ketercapaian Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	50	50	100,00	
		1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	50	50	100,00	
	3	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100,00	100,00	
		1	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	11	11	100,00	
		2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	120	120	100,00	
		3	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	262	262	100,00	
	4	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Ketercapaian Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	1	100,00	
		1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1	1	100,00	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	109,42	109,42	100,00	Target telah tercapai
	1	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Persentase Ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6	5	83,33	
		1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	1	100,00	
		2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2	1	50,00	

		3	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1	1	100,00	
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2	100,00	
	2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	100	100,00	100,00	
		1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	10	10	100,00	
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	19	19	100,00	
		3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	247	0	0,00	
		4	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	109,42	109,42	100,00	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	91,73	99,59	108,57	Target telah tercapai
	1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	100	100,00	100,00	
		1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	17	17	100,00	
		2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1919	1910	99,53	
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	242	242	100,00	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	100,00	100,00	100,00	Target telah tercapai
	1	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	1	1	100,00	

		Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah						
	1	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah</i>		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	1	1	100,00	
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Target telah tercapai
	1	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	1	1	100,00	
	1	<i>Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</i>		Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1	1	100,00	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00	100,00	100,00	Target telah tercapai, dikarenakan pekerjaan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, namun masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota)
	1	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	2	100,00	
	1	<i>Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100,00	
	2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1	1	100,00	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	Target telah tercapai, dikarenakan pekerjaan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, namun masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota)
	1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	2	100,00	
	1	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah</i>		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1	1	100,00	
	2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi</i>		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1	1	100,00	

BAB III

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI

a. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang tersedia. Penetapan target kinerja pada tahun anggaran 2022 ini tidak terlepas dari pencapaian outcome atau kinerja Dinas pada tahun sebelumnya sehingga terus berkesinambungan. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Adapun target kinerja yang telah diperjanjikan seperti pada tabel dibawah ini:

				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	100%							2.505.258.400
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	100%							4.490.000.000
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
				Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	100%							275.000.000
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

				Jumlah Unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%							2.684.019.000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%							125.000.000
		Program Kawasan Permukiman		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								
		Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	219 Ha	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah	6 Dokumen							650.000.000

				15 (Lima Belas) Ha								
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								
				Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	100%							8.637.818.653
		Program Pengembangan Perumahan		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								
		Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	43,50%	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	17 Dokumen							740.000.000
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								
				Jumlah Orang Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	50 Orang							345.444.000

				Relokasi Program Provinsi								
		Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	25,005	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								
				Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100 Orang							34.495.803.348
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								
				Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen							105.910.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								
		Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	91,73%	Persentase Penyelenggaraan PSU Permukiman	100%							320.465.785.148
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas								

				Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah								
		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	100%	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan	1 Laporan							117.200.000
				Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan								
				Perencanaan Rumah serta Perencanaan								
				Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah								
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi								
		Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah	1 Dokumen							100.000.000
		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								

b. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar **Rp. 396.030.867.046** (Tiga Ratus Sembilan Enam milyar Tiga Puluh Juta Delapan ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh enam Rupiah) Dengan rincian:

Tabel 1.42
Rencana Belanja menurut jenis belanja

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
		Pagu Anggaran
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	390.680.567.445
5.1.01	Belanja Pegawai	17.657.268.497
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.023.298.948
5.2	BELANJA MODAL	5.550.299.601
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.299.601
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.350.000.000

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten melaksanakan 8 Program, 20 Kegiatan dan 80 Sub Kegiatan yang terbagi menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Senilai Rp. 30.472.905.897,00 Program Pengembangan Perumahan Senilai Rp. 35.687.157.348,00, Program Kawasan Permukiman Senilai Rp. 9.287.818.653,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Senilai Rp. 320.465.785.148,00 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai Rp. 117.200.000,00 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum senilai Rp. 100.000.000,00 Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee senilai Rp. 50.000.000,00 Program Penatagunaan Tanah senilai Rp. 50.000.000,00.

Rincian Program , kegiatan dan subkegiatan diantaranya:

Tabel 2.5

Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		100 Persen
a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
b		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
c		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
d		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen
e		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen
f		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
g		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100 Persen
a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58 org/bln
b		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
c		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen
d		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
e		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen
f		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
g		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		100 Persen
A		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
b		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
c		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
d		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
e		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		100 Persen
a		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket
b		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
c		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
d		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja pegawai	2 Dokumen
e		Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang

5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100 Persen
a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket
b		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	10 Paket
c		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket
d		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket
e		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen
f		Penyediaan Bahan/Material	156 Paket
g		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
h		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
i		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
j		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD	1 Dokumen
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100 Persen
b		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit
7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100 Persen
a		Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan
b		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
c		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan
d		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100 Persen
e		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
c		Peralatan dan Mesin Lainnya	392 Unit
d		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit
a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit
b		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71 Unit
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		43,50
1	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI		100 Persen
a		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen
b		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen
c		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen
d		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
e		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
f		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	1 Dokumen

f		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen
f		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen
2	SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI		100 Persen
a		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	60 Orang
b		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	100 Orang
c		Koordinasi untuk Menyetujui Penerimaan dan Jenis Pelayanan	1 Dokumen
3	PEMBANGUNANAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI		
a		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	38 Unit Rumah
b		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencan	176 Unit Rumah
c		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	363 Unit Rumah
4	PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM		1 Dokumen
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan
b		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen
III	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH		
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan
IV	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		
1	PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI		100 Persen
a		Pemberitahuan, Pendataan awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen
V	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		219 Ha / 4 Kegiatan
1	PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (Sepuluh) Ha SAMPAI		160,00 Ha

	DENGAN DI BAWAH 15 (Lima Belas) Ha		
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman	1 Laporan
b		Penyusunan/Review/Legalisasi kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen
2	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (Sepuluh) Ha SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (Lima belas) Ha		160,00 Ha
a		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	22,06 Ha
b		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	26 Unit Rumah
5	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN		94,48 Persen
a		Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	6 Dokumen
b		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1483 Lokasi
c		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	226 Laporan
c		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1 Laporan
VI	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		
1	PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI		100 Persen
a		Pemberitahuan, Pendataan awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen
VII	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
2	PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		100 Persen
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses Dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
VIII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
3	PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		100 Persen
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Semoga Rencana Aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA AKSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2024

RENCANA AKSI DAERAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

OPD
TAHUN ANGGARAN

: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET				PAGU ANGGARAN	KETERANGAN (Kinerja Fisik)
				TW-1	TW-2	TW-3	TW-4		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							30.472.905.897	
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		100 Persen					1.460.000.000	
a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen					594.000.000	
b		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen					15.000.000	
c		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen					15.000.000	
d		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen					15.000.000	
e		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen					15.000.000	
f		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan					460.000.000	
g		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan					346.000.000	
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100 Persen					18.333.628.497	
a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58 org/bln					17.033.628.497	

b		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen					650.000.000	
c		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen					500.000.000	
d		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen					10.000.000	
e		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan					20.000.000	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen					10.000.000	
f		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan					100.000.000	
g		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen					10.000.000	
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		100 Persen					275.000.000	
a		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen					50.000.000	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen					50.000.000	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan					90.000.000	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan					15.000.000	
b		Penatausahaa Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan					70.000.000	

4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		100 Persen					600.000.000	
a		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket					200.000.000	
b		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen					50.000.000	
c		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen					200.000.000	
d		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja pegawai	2 Dokumen					50.000.000	
e		Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang					100.000.000	
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100 Persen					2.505.258.400	
a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket					160.802.000	
b		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	10 Paket					469.456.400	
c		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket					30.000.000	
d		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket					60.000.000	
e		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen					45.000.000	
f		Penyediaan Bahan/Material	156 Paket					1.175.000.000	
g		Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan					50.000.000	
h		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan					300.000.000	
i		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen					150.000.000	

j		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD	1 Dokumen					65.000.000	
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100 Persen					125.000.000	
b		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit					125.000.000	
7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100 Persen					4.490.000.000	
a		Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan					50.000.000	
b		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan					550.000.000	
c		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan					40.000.000	
d		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	12 Laporan					3.850.000.000	
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100 Persen					2.684.019.000	
e		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit					300.000.000	
c		Peralatan dan Mesin Lainnya	392 Unit					488.623.000	
d		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit					490.476.000	
a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit					183.370.000	

b		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71 Unit					1.221.550.000	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		43,50					35.487.157.348	
1	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI		100 Persen					540.000.000	
a		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen					110.000.000	
b		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen					110.000.000	
c		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen					110.000.000	
d		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen					50.000.000	
e		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen					50.000.000	
f		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	1 Dokumen					100.000.000	
f		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen					110.000.000	
f		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen					110.000.000	

2	SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI		100 Persen					345.444.000	
a		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	60 Orang					86.080.000	
a		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	100 Orang					220.604.000	
a		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	1 Dokumen					38.760.000	
3	PEMBANGUNANAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI							34.495.803.348	
a		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	38 Unit Rumah					2.235.924.390	
b		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencan	176 Unit Rumah					27.774.878.958	
c		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	363 Unit Rumah					4.485.000.000	
4	PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM		1 Dokumen					105.910.000	
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan					55.910.000	
a		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen					50.000.000	

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (Sepuluh) Ha SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (Lima belas) Ha		160,00 Ha					8.637.818.653	
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	22,06 Ha					6.337.818.653	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	26 Unit Rumah					2.300.000.000	
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN		94,48 Persen					320.465.785.148	
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	6 Dokumen					779.571.800	
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1483 Lokasi					294.444.516.348	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	226 Laporan					25.094.797.000	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1 Laporan					146.900.000	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							200.000.000	
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI		100 Persen					100.000.000	
	Pemberitahuan, Pendataan awal lokasi, Konsultasi Peblik Rencana	1 Dokumen					100.000.000	

	Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum							
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		100 Persen					50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses Dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara					50.000.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								
PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		100 Persen					50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen					50.000.000	